

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI DESA
(Study Kasus Desa Pakelen, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara)**

Supartinah¹

Abstrak

Desa Pakelen merupakan salah satu desa di kecamatan Madukara, kabupaten Banjarnegara, propinsi Jawa Tengah. Desa Pakelen memiliki beberapa struktur organisasi mulai dari organisasi formal yang mudah dikenali masyarakat luas hingga struktur organisasi non formal. Struktur organisasi desa Pakelen dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat desa Pakelen. Adapun dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam struktur organisasi tersebut. Dalam hal ini apakah keterlibatan perempuan khususnya untuk pengambilan keputusan di desa Pakelen atau tempat tinggal mereka telah sejajar dengan laki-laki.

Penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam struktur organisasi desa yang dilakukan di desa Pakelen, kecamatan Madukara, kabupaten Banjarnegara merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dimana melalui teknik ini diharapkan sampel yang ada benar-benar mampu memberikan informasi yang tepat mengenai fokus penelitian tersebut. Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan dengan observasi langsung dan wawancara. Validitas data menggunakan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data kemudian dilakukan penarikan kesimpulan hasil penelitian.

Hasil penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam struktur organisasi desa Pakelen menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Dalam struktur organisasi desa Pakelen baik yang formal maupun non formal cenderung didominasi oleh laki-laki, hanya sedikit perempuan yang terlibat dalam struktur organisasi dan itu pun hanya dalam struktur organisasi non formal. Sosialisasi mengenai kesetaraan gender pernah diadakan, namun belum memberikan adanya perubahan karena mereka hanya menjalankan atau mengikuti sosialisasi tersebut dan tidak mengaplikasikan agar dapat sejajar dengan laki-laki. Kenyataan yang ada kesempatan terhadap perempuan belum dapat seimbang dengan laki-laki, dalam kepemimpinan organisasi yang ada di desa Pakelen masih diutamakan laki-laki untuk memegang jabatan penting.

Key Words: Partisipasi, perempuan, struktur organisasi

¹ Alumni Pendidikan Sosiologi FISE UNY

A. Pendahuluan

Diakui atau tidak, gerak maju kaum perempuan di Indonesia masih menghadapi banyak persoalan. Masalah yang dihadapi kaum perempuan, seperti ketertinggalan, terpinggirkan, dan belum mampu berperan maksimal di semua lini, masih menjadi problem yang perlu diperjuangkan, khususnya oleh para aktivis perempuan. Upaya memajukan kaum perempuan, seringkali tersandung berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial dan budaya, yang hingga kini masih menimbulkan bias gender di masyarakat. Budaya patriarki yang masih kental dirasakan pada masyarakat Jawa menjadi salah satu faktor utama yang mengakibatkan perempuan termarginalisasi. Perilaku seseorang yang sudah terpola menyangkut hak dan kewajiban serta berhubungan dengan status pada kelompok ataupun masyarakat tertentu pada situasi sosial yang khas mengakibatkan bias gender itu mapan. Pemahaman yang keliru akan kodrat perempuan menjadi salah satu pemicunya. Kodrat perempuan yang seakan-akan terdiri atas mengandung, melahirkan, dan menyusui itu menimbulkan persepsi distorsi masyarakat bahwa perempuan hanya berperan di rumah tangga. Akibatnya, peranan perempuan masih dibatasi dan dikekang.

Dalam dunia politik juga masih sedikit sekali perempuan yang ikut berperan aktif di dalamnya baik di tingkatan yang paling bawah seperti struktur

organisasi desa hingga di struktur negara. Hak-hak perempuan seakan-akan dibatasi karena anggapan-anggapan yang mensubordinasikan kaum perempuan. Kata kesetaraan gender yang sering disebut nyatanya hingga kini kurang dirasakan kaum perempuan seutuhnya. Jika kita lihat, banyak kaum perempuan yang memiliki kualitas yang cerdas, berkompeten seperti kaum laki-laki, namun tetap saja kaum perempuan menjadi nomor dua dan hanya dipandang sebelah mata.

Struktur organisasi pemerintahan Desa Pakelen, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara selama ini masih didominasi oleh kaum Laki-laki, hal tersebut tentunya tidak terlepas dari pandangan sistem tradisional yang ada pada masyarakat desa Pakelen. Selain struktur organisasi formal seperti organisasi pemerintahan desa, dalam struktur organisasi non formal juga hanya sedikit perempuan yang terlibat didalamnya. Pandangan tersebut yang kemudian menimbulkan adanya bias gender atau kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam struktur organisasi Desa Pakelen. Hak-hak perempuan untuk dapat berperan aktif dalam struktur organisasi desa seolah-olah dibatasi dan berakibat perempuan termarginalisasi dari struktur organisasi desa tersebut.

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan tingkat wilayah atau tempat tinggal juga tergolong relatif rendah, sejauh ini masih banyak kaum perempuan pasif terhadap banyak hal, ini dapat

disebabkan kurangnya kesempatan kaum perempuan untuk dapat memberikan suaranya dalam rapat-rapat atau pengambilan keputusan. Kata kesetaraan gender yang sering diperbincangkan orang nyatanya hingga kini kurang mampu dirasakan oleh kaum perempuan seutuhnya, karena banyak kaum perempuan belum merasakan adanya kesetaraan gender tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana gambaran sebenarnya mengenai partisipasi perempuan dalam struktur organisasi desa baik dalam struktur organisasi yang formal maupun non formal, khususnya di Desa Pakelen.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) untuk mengetahui partisipasi perempuan desa Pakelen dalam struktur organisasi (formal dan non formal); 2) untuk mengetahui kesempatan perempuan desa Pakelen dalam memperoleh kedudukan di struktur organisasi desa (formal dan non formal).

B. Tinjauan Pustaka

1. Kajian Gender

Gender adalah sebuah kata kuno yang diberi makna baru. Dalam perkembangannya, gender menjadi sebuah ideologi. Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti "jenis kelamin", istilah gender acap kali di rancukan dengan seks. Seks mengacu pada perbedaan biologis, seperti kromosomal, hormonal, atau fisik antara laki-laki

dan perempuan; sedangkan gender mengacu pada identitas sosial yang mengandung peranan yang harus dilakukan oleh seseorang karena jenis kelamin mereka, di mana peranan tersebut sesuai dengan konstruksi sosial maupun kultural. Seks diyakini sebagai biologi tubuh, sementara gender mengacu pada asumsi dan praktik budaya yang mengatur konstruksi sosial laki-laki, perempuan dan relasi sosial antara keduanya. Gender merupakan perbedaan antara bentuk nyata dan jenis kelamin yang diberikan, sehingga membentuk dua kategori umum: maskulin dan feminim.

Terbentuknya perbedaan gender yang berakibat pada munculnya ketidakadilan gender tersebut dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial, budaya, melalui ajaran agama bahkan juga oleh negara. Melalui proses yang panjang tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang seolah-olah bersifat biologis dan tak bisa diubah lagi.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keamanan nasional serta menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan, baik terhadap

laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain kesetaraan gender dapat dikatakan sebagai persamaan hak dan derajat bagi kaum perempuan. Adapun gerakan kesetaraan gender yang dipelopori oleh para feminisme yaitu: Feminisme Liberal, Feminisme Radikal, Feminisme Marxis, dan Feminisme Sosialis.

2. Teori Interaksionisme Simbolik

George Herbert Mead merupakan salah satu tokoh sosiologi. Mead memiliki pemikiran yang mempunyai sumbangan besar terhadap ilmu sosial dalam perspektif teori yang dikenal dengan interaksionisme simbolik. Mead mengemukakan bahwa dalam teori Interaksionisme Simbolik, ide dasarnya adalah sebuah symbol, symbol ini muncul akibat dari kebutuhan setiap individu untuk berinteraksi dengan orang lain. Pada proses berinteraksi tersebut pasti ada suatu tindakan atau perbuatan yang diawali dengan pemikiran. Dalam tinjauannya di buku *Mind, Self and Society*, Mead berpendapat bahwa bukan pikiran yang pertama kali muncul, melainkan masyarakatlah yang terlebih dulu muncul dan baru diikuti pemikiran yang muncul pada dalam diri masyarakat tersebut. George Herbert Mead mengemukakan beberapa konsep yang mendasari teori interaksionisme simbolik, yaitu:

a. Tindakan

Mead menganalisa perbuatan dengan pendekatan behavioris serta memusatkan perhatian pada stimulus dan respon. Mead

mengemukakan bahwa stimulus tidak selalu menimbulkan respon otomatis seperti apa yang diperkirakan oleh aktor, karena stimulus adalah situasi atau peluang untuk bertindak dan bukannya suatu paksaan.

b. Sikap-isyarat (Gesture)

Mead mempunyai pandangan bahwa gesture merupakan mekanisme dalam perbuatan sosial serta dalam proses sosial. Gestur adalah gerak organisme pertama yang bertindak sebagai rangsangan khusus yang menimbulkan tanggapan (secara sosial) yang tepat dari organisme kedua.

c. Simbol

Gestur ini menjadi symbol ketika dia bisa membuat seorang individu mengeluarkan respon-respon yang diharapkan olehnya yang juga diberikan oleh individu yang menjadi sasaran dari gesturnya, karena hanya ketika symbol-symbol ini dapat dipahami dengan makna respon yang samalah seorang individu dapat berkomunikasi dengan individu yang lainnya.

Menurut Mead, masyarakat sebagai pola-pola interaksi dan institusi sosial yang dalam arti hanya seperangkat respon yang biasa terjadi atas berlangsungnya pola-pola interaksi tersebut, karena Mead berpendapat bahwa masyarakat ada sebelum individu dan proses mental atau proses berpikir muncul dalam masyarakat. Jadi, pada dasarnya Teori Interaksionisme Simbolik adalah sebuah teori yang mempunyai inti bahwa manusia bertindak

berdasarkan atas makna-makna, dimana makna tersebut didapatkan dari interaksi dengan orang lain, serta makna-makna itu terus berkembang dan disempurnakan pada saat interaksi itu berlangsung.

3. Partisipasi Perempuan

Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat pedesaan.

Menurut Cokrowinoto, partisipasi sebagai proses intelektual dan emosional dalam dinamika organisasi dan hal ini hanya dapat berlangsung dalam konteks pengambilan keputusan. Partisipasi merupakan pemerataan hak-hak politik bagi seluruh warga desa dalam pengambilan keputusan, partisipasi politik menyangkut kesediaan dan kemampuan untuk melakukan pembaharuan dalam rangka menghilangkan rintangan-rintangan pembangunan desa. Tingkat partisipasi tergantung dengan

alasan masing-masing. Hal ini dapat disadari karena adanya faktor-faktor yang dapat mendorong dan menghambat adanya partisipasi.

Partisipasi menurut Keith Davis, dapat dibagi dalam beberapa jenis yaitu: a) Partisipasi pikiran; b) Partisipasi tenaga; c) Partisipasi tenaga dan pikiran; d) Partisipasi keahlian; e) Partisipasi barang; f) Partisipasi uang. Sedangkan jenis-jenis partisipasi menurut Taliziduhu Ndraha yang mengutip pendapat dari beberapa ahli: a) Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi; b) Partisipasi dalam memberi tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima; c) Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan; d) Partisipasi dalam menerima pembangunan.

Sejauh ini masih sedikit perempuan yang dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Representasi perempuan dalam lembaga pemerintahan sangat perlu karena kondisi Indonesia masih kuat dengan budaya patriarki dan kesadaran kesetaraan gender orang Indonesia masih rendah. Representasi adalah keterwakilan atau kehadiran perempuan dalam posisi pengambilan keputusan dan penentu kebijakan di lembaga-lembaga pemerintahan atau tempat tinggal. Kurangnya kesadaran itu menyebabkan perempuan masih dibawah laki-laki keberadaannya. Peraturan dan perundangan di Indonesia serta birokrasi pemerintah masih banyak yang belum memberikan kesempatan

bagi perempuan untuk menduduki jabatan puncak.

Menurut Keith Devis dalam Naning Margasari, partisipasi harus melibatkan mental dan emosional dalam situasi kelompok dan rasa tanggung jawab terhadap kelompok. Dari pengertian tersebut, ini mengingatkan kita bahwa memang mental dan emosional perempuan dan laki-laki tidak sama. Perempuan cenderung lebih emosional dan memiliki mental yang lemah dari laki-laki. Hal ini juga akan mempengaruhi kesadaran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Partisipasi perempuan dapat dimulai dari lingkungan rumah tangga, desa, kota, hingga tingkat nasional bahkan internasional. Dalam tingkat mikro perempuan berperan dalam lingkungan rumah, di tingkat organisasi masyarakat dan bahkan ke tingkat makro yaitu partai politik, parlemen dan di struktur pemerintahan. Para pemimpin partai politik sudah seharusnya mulai memperhatikan kebijakan kesetaraan gender dan segera mengimplemetasikannya. Sehingga kata-kata "kesetaraan gender" bukanlah hanya sekedar retorika. Perhatian disini bukan dalam artian "kuantitas" namun dengan menempatkan kaum perempuan dengan "kualitas" yang pantas ditempatkan pada nomor "prioritas" dan mengacu kepada prinsip hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia.

C. Hasil Penelitian

1. Gambaran Struktur Organisasi Desa Pakelen

Masyarakat desa Pakelen dapat dikatakan masih tradisional, struktur sosial yang ada relatif masih sederhana, struktur sosial tersebut ditentukan oleh kebutuhan yang ada di desa Pakelen. Struktur organisasi di Desa Pakelen cukup beragam, mulai dari organisasi formal yang biasanya mudah kenali masyarakat luas hingga organisasi non formal. Struktur organisasi tersebut antara lain; Struktur Pemerintahan Desa, PKK, LP3M, BPD, Karang Taruna, LMDH.

Pemerintahan Desa menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan terendah di bawah kecamatan. Dalam struktur pemerintahan desa terdapat perangkat desa yang mengatur Pemerintahan Desa. Kepala desa mempunyai tugas sebagai pelaksana dan penanggung jawab penyelenggaraan pemerintah desa. Selain itu juga sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan di desa, pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan kehidupan masyarakat desa, menggerakkan partisipasi masyarakat, serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pembangunan desa dan kemasyarakatan.

Dari beberapa posisi struktur pemerintahan Desa Pakelen yang dicantumkan diatas selama ini masih dipegang penuh oleh laki-laki, perempuan belum dapat ikut berperan di dalamnya.

Kenyataan tersebut menggambarkan adanya

ketidakadilan dan deskriminasi terhadap perempuan. Ketidakadilan dan deskriminasi perempuan disebabkan oleh faktor budaya dan hukum sebagaimana disebutkan dalam bahasan sebelumnya. Masyarakat Jawa identik dengan konstruksi budaya patriarkhi. Demikian pula yang terdapat pada masyarakat di desa Pakelen ini, meskipun tidak lagi terdapat bias gender yang begitu ekstrim tapi konstruksi budaya patriarkhi masih melekat di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terdapat gambaran mengenai internalisasi budaya patriarkhi yang masih kuat. Dalam hal ini ditunjukkan dengan kondisi dimana fungsi penuh pengambilan keputusan masih dipegang oleh laki-laki atau masih sedikit perempuan yang dapat berpartisipasi secara aktif didalam struktur organisasi-organisasi yang ada di desa Pakelen. Pandangan-pandangan yang mensubordinasikan perempuan kadang membuat perempuan ragu untuk maju dan dapat sejajar dengan laki-laki. Selama ini perempuan Desa Pakelen belum ada yang mau atau mampu bersaing untuk dapat masuk dalam struktur pemerintahan Desa Pakelen. Kondisi demikian tersebut diungkapkan Bapak KS, sebagai berikut:

“Menurut saya, sesuai dengan gender memang ada penyetaraan, tapi nyatanya untuk bersaing khususnya dalam masalah politik perempuan disini belum

mampu bersaing dengan laki-laki. Sepanjang itu menang dalam pilkada ya tidak masalah, soalnya untuk kepala desa itu kan dipilih langsung oleh rakyat. Sepanjang memenuhi syarat administratif ya bisa-bisa saja”.

Kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan ini penting bagi mereka dan karenanya tidak perlu pembedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, karena perempuan makhluk rasional juga. Jadi pandangan ini menyimpulkan bahwa ketika sistem sudah memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, jika perempuan tidak mampu bersaing dan kalah, yang perlu disalahkan adalah kaum perempuan itu sendiri. Dalam hal ini kesempatan dan hak dalam struktur organisasi desa Pakelen antara laki-laki dan perempuan tidak ada pembedaan. Kondisi demikian tersebut diungkapkan Bapak BY, sebagai berikut:

“Tidak ada, ya selama itu memenuhi syarat siapapun bisa masuk. Tapi nyatanya kan belum ada perempuan yang mau nongol ikut menyalon. Semuanya diatur sesuai dengan undang-undang atau aturan, seperti untuk kepala desa kan dipilih langsung oleh rakyat, KADUS dengan cara tes. Semuanya bisa mendaftar atau menyalon kalau memang memenuhi syarat, jadi gak ada perbedaan perempuan dan laki-laki”

Secara umum masyarakat desa Pakelen tidak mempermasalahkan pemimpin haruslah laki-laki dan sependapat dengan budaya patriarkhi yang menganggap perempuan lemah dan tidak pantas menjadi pemimpin, namun mereka juga mengakui untuk desa Pakelen lebih tepat dipimpin oleh laki-laki dengan alasan letak geografis yang jauh antara dusun yang satu dengan yang lain maupun dari desa yang satu dengan desa yang lain. Kondisi demikian tersebut diungkapkan Bapak BY, sebagai berikut:

“Secara fisik memang iya, tapi secara pemikiran tidak. Untuk desa Pakelen mungkin memang laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin soalnya lokasinya seperti ini jauh antara kampung yang satu dengan yang lain. Tapi untuk pemikiran perempuan juga gak bisa disepelekan”.

Dengan demikian secara umum kesempatan dalam struktur organisasi pemerintahan desa Pakelen sudah ada penyeteraan antara laki-laki dan perempuan namun dalam kenyataan yang ada kurang adanya sosialisasi yang dapat menjadikan perempuan sadar akan perannya dalam struktur organisasi desa dan berani maju atau bersaing dengan laki-laki. Seperti halnya struktur pemerintahan desa, organisasi lain seperti LP3M (Lembaga Perencana Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Karang Taruna, LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan); pengurusnya semua laki-laki

(kecuali PKK: Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga). Dari beberapa organisasi yang ada di desa Pakelen menyimpulkan keterlibatan dan kesempatan perempuan dalam struktur organisasi yang ada masih relatif sedikit, perempuan akan menduduki posisi sebagai ketua dan struktur yang lain hanya dalam organisasi yang digerakkan oleh perempuan atau organisasi yang hanya melibatkan perempuan. Sosialisasi mengenai kesetaraan gender yang pernah diadakan nampaknya tidak merubah cara pandang masyarakat desa Pakelen. Kenyataan yang ada sejauh ini keberadaan perempuan masih dipandang nomor dua, khususnya dalam struktur organisasi di desa Pakelen.

2. Partisipasi Perempuan Desa Pakelen dalam Struktur Organisasi Desa

Partisipasi perempuan selama ini mengalami banyak kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah perspektif negatif perempuan sendiri terhadap dirinya, perspektif negatif itu sendiri merupakan refleksi dari kontak sosial dan ekonomi. Studi tersebut menemukan bahwa kecemasan perempuan untuk memenuhi perannya sebagai ibu dan pengasuh, dan kepeduliannya terhadap kesejahteraan anak-anaknya, serta kekeliruan mengabaikan keluarganya yang menghalangi mereka untuk meluangkan waktu dalam organisasi politik dan kemasyarakatan. Kenyataan yang

ada hanya sedikit sekali perempuan yang terlibat dalam struktur organisasi desa dan itupun hanya dalam struktur organisasi non formal, posisi tersebut hampir bisa dipastikan menempati posisi yang identik dengan stereotipe pekerjaan domestik seperti sekretaris serta seksi atau divisi sosial. Perempuan jarang sekali duduk sebagai ketua atau posisi-posisi strategis lainnya. Kondisi demikian tersebut diungkapkan Bapak KS, sebagai berikut:

“Perempuan juga masuk dalam struktur organisasi atau kepengurusan. Ya biasanya jadi sekretaris atau bendara. Untuk ketua biasanya masih dipegang oleh laki-laki”.

Hal ini mengisyaratkan bahwa keterlibatan perempuan di dalam struktur organisasi desa masih rendah. Kondisi tersebut tentu saja tidak sebanding dengan jumlah perempuan yang cukup besar yaitu separuh dari jumlah penduduk Indonesia, namun perempuan tidak terwakili baik secara fisik maupun aspirasinya dalam pembuatan kebijakan.

Organisasi dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan wacana gender termasuk partisipasi perempuan. Melalui organisasi, kaum perempuan diharapkan dapat menghimpun kesadaran kolektif akan pentingnya perjuangan hak-hak yang selama ini terabaikan. Organisasi merupakan bentuk perlawanan kolektif mendorong perubahan untuk kesetaraan dan keadilan. Dengan berorganisasi

berarti perempuan mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam proses-proses pembuatan kebijakan. Hingga kini, keterlibatan perempuan dalam wilayah publik baik dalam organisasi-organisasi sosial belum banyak memberikan ruang bagi perempuan untuk mengartikulasikan kepentingannya. Hal ini dikarenakan keterlibatan perempuan dalam proses-proses dalam pengambilan kebijakan sangat minim. Perempuan lebih banyak dimasukkan dalam organisasi-organisasi yang kurang strategis yaitu yang kurang bersinggungan dengan proses-proses pengambilan kebijakan penting dalam wilayah publik.

Pengalaman-pengalaman perempuan dalam berorganisasi kerap sekali tidak diperhitungkan, sebenarnya perempuan mempunyai kontribusi dan pengalaman terlibat dalam aktivitas-aktivitas pengambilan keputusan. Namun dikarenakan watak sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat yang patriarkhis, menjadikan peran-peran yang dilakukan perempuan cenderung diabaikan. Kondisi tersebut berkaitan dengan anggapan bahwa wilayah publik bagi perempuan bukan merupakan wilayah utama, sehingga membatasi perempuan untuk secara total terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan publik. Sementara bagi laki-laki yang memiliki supremasi dalam ruang publik, mereka mempunyai modal yang lebih besar untuk berkarir dalam wilayah

publik. Sehingga organisasi-organisasi yang dimasuki dan diperuntukkan bagi perempuan seringkali jauh dari aktivitas-aktivitas pengambilan keputusan publik yang penting. Perempuan dianggap bukan pelaku utama dalam institusi-institusi sosial masyarakat.

Mengenai posisi perempuan sebagai pemimpin atau di jabatan-jabatan strategis ini sebagian informan seperti BY, RD, dan KS mengatakan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin asal memiliki kemampuan dan pengalaman. Artinya kalau perempuan mau menjadi pemimpin harus mempunyai "kualitas dan kemampuan". Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa perempuan harus mampu bersaing dengan laki-laki. Selama ini perempuan lebih diarahkan terutama untuk berperan sebagai istri dan ibu, sehingga sangat kurang memahami haknya sebagai manusia maupun sebagai warga negara yang seharusnya berpartisipasi.

Sejauh ini partisipasi perempuan desa Pakelen sudah dapat dikatakan baik, namun belum dapat sejajar dengan laki-laki. Kondisi demikian tersebut diungkapkan Bapak KS, sebagai berikut:

"Cukup bagus lah untuk sekarang ini, kan kalau ada rapat perempuan juga terlibat dan mau untuk ikut mengeluarkan pendapat. Untuk partisipasi memang masih besar laki-laki dibanding perempuan".

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak BY, sebagai berikut:

"Dalam rapat juga perempuan ikut andil untuk mengeluarkan aspirasinya atau pendapatnya. Untuk partisipasi Masih banyak laki-laki, tapi perempuan juga sudah ikut berpartisipasi"

Emile Durkheim mengemukakan bahwa gaya berpikir masyarakat pedesaan sangatlah sederhana, tidak seperti masyarakat perkotaan yang lebih suka melihat sesuatu dari fungsi, proses, atau gerak. Masyarakat pedesaan lebih suka melihat sesuatu dari bentuk lahiriyah saja. Oleh karena masyarakat desa cenderung pasif dalam banyak hal seperti dalam organisasi, hal tersebut tentunya disebabkan oleh cara pandang masyarakat desa yang masih tradisional dibandingkan dengan masyarakat kota.

Partisipasi perempuan desa Pakelen dalam struktur organisasi belum dapat sejajar dengan laki-laki. Kondisi demikian tersebut diungkapkan oleh Ibu YN, sebagai berikut:

"Ya untuk sekarang si nek disini perempuan juga ikut dilibatkan, tapi memang perempuan belum bisa sejajar dengan laki-laki terutama dalam masalah kepemimpinan, ya soalnya khususnya untuk perempuan desa masih kurang berani bersaing dan belum maju kadang dah minder dulu".

Sesuai dengan jenis-jenis partisipasi yang disebutkan dalam bahasan sebelumnya, masyarakat

desa Pakelen berpartisipasi melalui partisipasi pikiran, partisipasi tenaga, dan partisipasi uang. Partisipasi pikiran dapat ditunjukkan dengan cara memberikan saran maupun solusi dalam rapat. Sementara partisipasi tenaga biasanya dilakukan dengan cara kerja bakti. Untuk partisipasi uang dilakukan dengan cara memberikan iuran untuk pembangunan desa. Dari jenis partisipasi yang kerap dilakukan masyarakat desa Pakelen, keterlibatan laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan.

- a. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan tingkat wilayah atau tempat tinggal

Terbukanya kesempatan perempuan sebagai pemimpin, berarti terbuka pula kesempatan perempuan untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Selama ini, pemimpin hampir selalu dikaitkan dengan sifat laki-laki atau maskulin yang menunjukkan laki-laki hampir selalu mengambil keputusan secara dominan. Perempuan memang mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan, namun peranannya hanya sebagai orang kedua, subordinat. Dalam hal ini perempuan belum secara otomatis mendapatkan hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki.

Dalam pengambilan keputusan atau rapat-rapat, serta perayaan hari besar atau kegiatan-kegiatan yang ada di desa perempuan sudah dilibatkan namun untuk menduduki posisi

sebagai ketua dalam organisasi masih relatif minim bahkan dapat dibayangkan tidak pernah, demikian fenomena yang ada di desa Pakelen. Kondisi demikian tersebut diungkapkan oleh Ibu AM, sebagai berikut:

“Iya dilibatkan, kalau perempuan tidak dilibatkan pasti laki-laki juga kesusahan. Ya biasanya menjadi bendahara atau sekretaris, kalau ketua ya masih tetap dipegang laki-laki kecuali organisasi itu perempuan semua”.

Secara umum masyarakat desa Pakelen tidak setuju dengan budaya patriarki yang memandang perempuan lemah dan tidak pantas menjadi seorang pemimpin, mereka mengakui bahwa perempuan tidak boleh diremehkan dan justru perempuan lebih teliti dari pada laki-laki. Pernyataan tersebut diungkapkan hampir semua informan seperti bapak BY, bapak RD, bapak KS, ibu TR, ibu YN, dan ibu AM. Kenyataan yang ada sejauh ini setiap organisasi di desa Pakelen masih dipegang penuh oleh laki-laki, ada yang mengatakan kelemahan jika perempuan menjadi seorang pemimpin kurang berani berspekulasi dan jika rapat malam perempuan mengalami kesusahan karena posisinya yang menjadi ibu rumah tangga dan harus mengurus anak-anaknya, pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak BY dan bapak KS. Dengan adanya anggapan-anggapan seperti itu tentu saja secara tidak langsung mensubordinasi perempuan untuk

berani maju bersaing dengan laki-laki.

Kenyataan yang ada di lapangan hanya sedikit perempuan yang aktif dalam organisasi yang ada di desa Pakelen, sejauh ini hanya istri-istri perangkat desa dan orang-orang yang ditunjuk untuk ikut aktif dalam PKK yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang ada. Kondisi demikian tersebut diungkapkan oleh Bapak RD, sebagai berikut:

“Untuk ketua dalam PKK itu dari istri kepala desa, wakil dari istri sekretaris desa, dan untuk struktur organisasi yang lain ditentukan oleh mereka. Kalau istri perangkat desa semuanya harus ikut, untuk anggota yang la dari kemauan dan kemampuan”.

Peran PKK dalam hal ini juga berpengaruh terhadap adanya pembangunan yang ada di desa, seperti program bersih-bersih dan yang lain. Selain PKK juga perempuan terlibat aktif dalam PNPM Mandiri yang ada di desa pakelen, PNPM Mandiri yang digerakkan oleh perempuan berbentuk simpan pinjam perempuan. Organisasi simpan pinjam perempuan ini hanya diikuti oleh perempuan karena dalam hal ini perempuan dituntut aktif dan dapat sejajar dengan laki-laki sesuai wacana kesetaraan gender. Kondisi demikian tersebut diungkapkan Bapak RD, sebagai berikut:

“Sudah cukup besar, biasanya partisipasi dalam rapat-rapat. Soalnya peran perempuan kan sekarang sangat diperlukan, misal dalam PNPM Mandiri itu pengurusnya kan harus ada yang

perempuan. Yang sudah melibatkan perempuan diantaranya PNPM Mandiri tadi, kan itu harus melibatkan perempuan. Contohnya dalam PNPM Mandiri ada simpan pinjam perempuan itu semuanya diurus oleh perempuan”.

Dalam hal ini perempuan memang dilibatkan dalam masalah desa, namun dalam struktur organisasi perempuan dapat menduduki posisi sebagai ketua atau wakil hanya dalam organisasi yang anggotanya perempuan semua, jika organisasi tersebut ada laki-lakinya maka perempuan hanya sebagai sekretaris, bendahara dan anggota saja. Memang secara umum mereka tidak memperlakukan jika yang menjadi pemimpin atau ketua itu perempuan namun fakta yang ada posisi-posisi tersebut masih dipegang kuat oleh laki-laki sedang perempuan disini hanya menerima apa yang jadi keputusan laki-laki.

Masyarakat desa biasanya memiliki hubungan yang erat antara masyarakat satu dengan yang lain, demikian halnya yang terjadi dengan masyarakat desa Pakelen. Hubungan erat yang terjadi dalam masyarakat desa Pakelen tentunya disebabkan adanya interaksi, namun dengan interaksi juga menimbulkan beberapa persepsi dalam masyarakat. Persepsi tersebut dapat menimbulkan sesuatu yang baik dan dapat menimbulkan sesuatu yang kurang baik. Persepsi tersebut dapat dilihat dalam kepemimpinan pemerintahan desa Pakelen, sebagian masyarakat desa Pakelen lebih setuju jika yang menjadi kepala desa adalah laki-laki

karena laki-laki dianggap lebih memiliki kualitas yang baik untuk menjadi seorang pemimpin dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dapat terlihat sejauh ini belum pernah ada perempuan yang menjadi kepala desa. Kondisi demikian tersebut diungkapkan Bapak BY, sebagai berikut:

“Selama ini belum ada kepala desa pakelen yang perempuan, untuk desa pakelen mungkin memang laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin soalnya lokasinya seperti ini jauh antara kampung yang satu dengan yang lain. Untuk seorang pemimpin perempuan kurang berani berspekulasi, walaupun perempuan juga lebih ulet & teliti”.

Menurut ahli interaksionisme simbolik menunjukkan bahwa individu berusaha mempertahankan diri berdasarkan gender dalam berbagai situasi, dengan kata lain individu mempunyai gagasan tentang makna laki-laki atau perempuan. Individu bertindak berdasarkan jenis kelamin dalam situasi tertentu, dan dapat berubah dari situasi ke situasi dengan adanya interaksi. Demikian halnya dengan perkembangan jaman dan interaksi yang baik masyarakat desa Pakelen menyatakan untuk kedepannya bisa saja yang menjadi kepala desa Pakelen adalah perempuan karena sekarang banyak perempuan yang cerdas dan sekolah tinggi seperti laki-laki.

b. Kesetaraan gender dalam struktur organisasi desa Pakelen

Konsep patriarkhi yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga sehingga undangan-undangan dalam rapat-rapat di RT/RW, kelurahan selalu ditujukan pada laki-laki. Kenyataan tersebut menggambarkan bahwa akses perempuan cukup rendah dalam organisasi-organisasi di tingkat lokal. Organisasi-organisasi di tingkat lokal sesungguhnya telah tersegregasi berdasarkan jenis kelamin. Di tingkat RT/ RW/ Kelurahan, perempuan diwadahi dalam Dasa Wisma dan PKK, sementara laki-laki dalam intitusi-istitusi rapat-rapat RT/ RW maupun rapat kelurahan yang membuat keputusan-keputusan penting di tingkat lokal. Sejalan dengan hal tersebut, untuk tingkat RT, RW, Lurah, maupun yang lainnya perempuan yang menjadi pemimpin atau ketua sangat minim bahkan untuk di desa Pakelen selama ini belum ada perempuan yang menjadi lurah, sekretaris, dan bendahara. Kondisi demikian tersebut diungkapkan Bapak BY , sebagai berikut:

“Belum ada, selama ini perempuan masih takut bayangan. Dalam arti takut bayangan tidak mampu atau kalah. Jadi selama ini belum ada perempuan yang mau ikut menyalonkan dirinya untuk menjadi lurah”.

Kesetaraan gender sebagai persamaan hak dan derajat bagi kaum perempuan sebagaimana

telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, belum begitu dirasakan dalam masyarakat desa Pakelen, khususnya dalam struktur pemerintahan desa Pakelen. Secara umum kriteria masuk dalam struktur organisasi desa Pakelen yaitu memiliki pengalaman dan kemampuan dalam memimpin serta disepakati oleh masyarakat banyak, namun dengan keadaan geografis desa pakelen yang merupakan daerah pedesaan dengan budaya tradisi yang cukup kental, kenyataan dilapangan untuk menentukan seorang pemimpin ditentukan oleh faktor ekonomi. Kondisi demikian tersebut diungkapkan Ibu TR , sebagai berikut:

“Sebagian masyarakat disini kan masih jarang yang sarjana. Malah faktor ekonomi yang lebih menentukan, ketika seseorang memiliki ekonomi yang baik dan keluarga yang besar secara otomatis mudah untuk mencari pendukung”.

Dengan memiliki ekonomi yang baik maka mereka juga memiliki pengaruh cukup besar dalam masyarakat ketika pemilihan kepala desa, dengan demikian kesetaraan gender yang meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan secara umum belum dapat dirasakan di desa Pakelen walaupun mereka mengatakan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk dapat masuk dalam struktur pemerintahan desa Pakelen maupun dalam struktur organisasi yang ada di desa Pakelen jika memenuhi syarat. Kondisi demikian tersebut

diungkapkan Bp. KS , sebagai berikut:

“Sepanjang itu menang dalam pilkada ya tidak masalah, soalnya untuk kepala desa itu kan dipilih langsung oleh rakyat. Sepanjang memenuhi syarat administratif ya bisa-bisa saja”.

Sosialisasi mengenai kesetaraan gender sebenarnya pernah diadakan oleh TIM dari Kecamatan Madukara di desa Pakelen, namun sejauh ini belum menggambarkan adanya perubahan yang signifikan. Kenyataan yang ada mereka hanya menjalankan perintah untuk mengikuti sosialisasi dari kecamatan tersebut tanpa mengaplikasikan sosialisasi tersebut untuk dapat sejajar dengan laki-laki. Sejauh ini hanya istri-istri perangkat desa yang mau berpartisipasi secara aktif, dan yang lain dapat dikatakan apatisme atau sikap orang yang tidak berminat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala umum atau khusus yang ada dalam masyarakatnya.

3. Pokok-pokok Temuan Studi

Dalam melakukan penelitian, baik dalam observasi atau pun wawancara mengenai partisipasi perempuan dalam struktur organisasi desa di Desa Pakelen, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara terdapat temuan-temuan yang pokok dalam penelitian, yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam pengambilan keputusan atau rapat desa sudah menerapkan kesetaraan gender sehingga

- perempuan juga dilibatkan dalam rapat
- b. Sosialisasi mengenai kesetaraan gender pernah diadakan oleh tim dari kecamatan, namun sejauh ini dalam struktur organisasi desa masih mengalami ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.
 - c. Sejauh ini belum ada perempuan Desa Pakelen yang menjadi kepala desa atau perangkat desa.
 - d. Perempuan desa Pakelen dapat dikatakan pasif, jadi jika tidak ditunjuk mereka seolah-olah tidak mau ikut berpartisipasi dalam organisasi yang ada.
 - e. Secara umum masyarakat Desa Pakelen tidak sejalan dengan budaya patriaki, namun fenomena yang ada menyimpulkan budaya patriaki masih nampak dalam perilaku masyarakat desa Pakelen.
 - f. Dalam struktur organisasi perempuan Desa Pakelen kurang diberi kesempatan untuk menduduki posisi sebagai ketua atau wakil.
 - g. Perempuan dapat menduduki posisi sebagai ketua atau wakil dalam struktur organisasi yang hanya beranggotakan perempuan.
 - h. Untuk menentukan pemimpin dalam struktur pemerintahan desa masih

dipengaruhi oleh faktor ekonomi.

D. Kesimpulan

Desa Pakelen merupakan salah satu desa yang ada Di Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Penduduk desa Pakelen kurang lebih 1342 jiwa dengan perincian laki-laki sejumlah 689 dan perempuan 653. Sebagian besar masyarakat desa Pakelen bermata pencaharian sebagai petani buah salak. Pendidikan masyarakat desa Pakelen cukup beragam, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat strata 1 atau sarjana. Hubungan sosial dalam masyarakat pakelen cukup baik dan masih terdapat adanya sistem gotong royong.

Organisasi yang ada di desa Pakelen cukup beragam, diantaranya yaitu organisasi pemerintahan desa, organisasi LP3M, organisasi BPD, organisasi Karang Taruna, organisasi LMDH, dan organisasi PKK. Kesetaraan gender dalam struktur organisasi desa Pakelen belum begitu dirasakan oleh perempuan desa Pakelen, walaupun secara umum tidak ada perbedaan kesempatan dalam struktur organisasi desa namun kenyataan yang ada gerak perempuan kurang diperhitungkan dan posisi-posisi pemimpin dalam organisasi masih dipegang penuh oleh laki-laki. Dari hasil penelitian diatas dapat di tarik berbagai macam kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam masyarakat desa Pakelen masih terlihat adanya budaya patriarkhi. Hal tersebut dapat dilihat posisi ketua atau pemimpin dalam struktur organisasi masih dipegang penuh oleh laki-laki.
2. Partisipasi perempuan desa Pakelen dalam struktur organisasi desa sejauh ini belum terlihat dan belum sejajar dengan laki-laki. Mulai dari kepala desa sampai bagian urusan umum masih didominasi oleh kaum laki-laki.
3. Dalam pengambilan keputusan atau rapat-rapat, serta perayaan hari besar atau kegiatan-kegiatan yang ada di desa perempuan sudah dilibatkan. Namun, posisi ketua masih tetap diduduki oleh laki-laki.
4. Kurangnya kesadaran atau pemahaman perempuan untuk dapat terlibat dalam struktur organisasi.

Daftar Pustaka

A. Nunuk. P. Murniati, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga)*, Magelang: Indonesia Tera, 2004.

George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Indrayati Suparno, *MASIH DALAM POSISI PINGGIRAN Membaca Tingkat Partisipasi Politik Perempuan di Kota Surakarta*, Solo: SPEK HAM, 2005.

Julia Claves Mosse, *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Keith Devis, dalam Santoro Sastropetro, *Partisipasi Komunikasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni

Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Naning Margasari, *Profil, Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Badan Perwakilan Desa Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta (FIS UNY).

Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan & Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Taliziduhu Ndraha, *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*, Jakarta: Bina Aksara, 1987,

Tommy F. Awwuy, *Wacana Tragedi dan Dekonstruksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Jentera, 1995